

Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Wilayah Jabotabek

Wardoyo¹, Hendro Prabowo²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma
Email: wardoyo@staff.gunadarma.ac.id

²Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma
Email: ndrahu@yahoo.com

Jalan Margonda Raya 100, Pondokcina – Depok

Abstrak

Potensi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Indonesia sangat besar mengingat jumlahnya di Indonesia diperkirakan sekitar 99,8 persen dan mampu menyerap 99.6 persen tenaga kerja. (BPS, 2002). Meski hanya memanfaatkan 10% dari total uang yang beredar, tetapi telah menyumbang 49% GDP dan 15% ekspor non-migas Indonesia. Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan betapa besar peranan usaha kecil dalam menyediakan lapangan kerja dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Dapat dikatakan pula bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki sumbangan yang besar terhadap keberlangsungan ekonomi Indonesia pada saat krisis dan pasca krisis ekonomi.

Berbagai upaya dilakukan oleh berbagai pihak dalam meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Lembaga-lembaga tersebut meliputi pemerintah, bank, perusahaan, lembaga donor baik dalam maupun luar negeri, dan LSM.

Dengan menggunakan data SMERU (1997-2003), paper ini menganalisis kinerja lembaga keuangan mikro dalam upaya untuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Jabodetabek yang meliputi beberapa variabel seperti: pencapaian hasil target group, permodalan, capacity building, , dan permasalahannya.

Dengan analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan hasil yang kurang maksimal bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kata kunci : kinerja, lembaga keuangan mikro, usaha mikro, kecil dan menengah.

A. PENDAHULUAN

Setidaknya dalam dua dasawarsa terakhir keuangan mikro telah menjadi suatu wacana global yang diyakini oleh banyak pihak menjadi metode untuk mengatasi kemiskinan. Berbagai lembaga multilateral dan bilateral mengembangkan keuangan mikro dalam berbagai program kerjasama. Pemerintah di berbagai negara berkembang juga telah mencoba mengembangkan keuangan mikro pada berbagai program pembangunan. Tidak ketinggalan berbagai lembaga keuangan dan lembaga swadaya masyarakat turut berperan dalam aplikasi keuangan mikro.

Di Indonesia sendiri posisi keuangan mikro dalam tataran wacana dan kebijakan masih marjinal meski sebenarnya keuangan mikro memiliki sejarah yang amat panjang. Pada beberapa waktu lalu terakhir wacana keuangan mikro kembali diangkat mengikuti perhatian yang juga semakin besar untuk mencari pendekatan alternatif untuk menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi rakyat yang peran strategisnya semakin diakui (Krisnamurthi, 2002).

Lembaga Keuangan Mikro baik formal, semi formal, maupun informal adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan jasa keuangan untuk pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah (Krisnamurthi, 2002).

Lembaga Keuangan Mikro mempunyai karakter khusus yang sesuai dengan konstituenya, seperti : 1) terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan, terutama simpanan dan pinjaman; 2) diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah; dan 3) menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana (Chotim dan Handayani, 2001).

Pada tahun 2000 jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang mendampingi pengusaha mikro kecil setidaknya tercatat berjumlah 56.644 LKM nonbank dengan berbagai variannya dan ada 42.186 unit LKM informal (Chotim dan Handayani, 2001).

Secara garis besar, LKM dapat dikelompokkan ke dalam LKM bank dan nonbank, berikut ini :

1. Bank
 - BRI Unit, berupa kantor-kantor cabang pembantu BRI
 - BPR, berupa bank-bank mikro yang tunduk pada Undang-Undang Perbankan serta Peraturan Perbankan oleh BI.
2. Nonbank
 - keluarga LKM nonbank yang besar (LDP di Bali, BKK di Jawa Tengah, BKD di Jawa dan Madura, BMT dan BK3D)
 - keluarga LKM nonbank yang kecil, dengan simpanan atau aktiva yang berjumlah kecil
 - berbagai program keuangan mikro, NGO, dan ratusan ribu asosiasi tidak resmi, KSM, dan lain-lain.

Sungguh sebuah harapan yang ideal. Namun harus realistis dengan kenyataan bahwa LKM memiliki beban berat dengan dirinya sendiri maupun ketika berhadapan dengan lingkungan eksternal. Secara internal, LKM masih berkuat juga dengan masalah manajemen, pengembalian kredit, dan lain-lain. Secara eksternal, harus berhadapan dengan berbagai kekuatan dan kepentingan agar dapat tetap *survive* di tengah situasi yang masih abu-abu.

Mengenai ukuran suatu LKM dalam pengertian jumlah dana yang dikelola, jumlah staf, jumlah klien, dan semacamnya harus menjadi besar karena biaya operasional suatu LKM relatif besar sementara nilai kredit dan simpanan yang dilayani mikro karenanya untuk dapat *survive* LKM harus memiliki *outreach* yang besar dan ini berarti kelembagaan suatu LKM juga harus besar (Ismawan, 2002).

Di sisi lain, potensi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Indonesia sangat besar mengingat jumlahnya di Indonesia diperkirakan sekitar 38 juta UMKM atau 99,8 persen dan mampu menyerap 58 juta atau 99,6 persen tenaga kerja. (BPS, 2002). Meski hanya memanfaatkan 10% dari total uang yang beredar, tetapi telah menyumbang 49% GDP dan 15% ekspor non-migas Indonesia. Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan betapa besar peranan usaha kecil dalam menyediakan lapangan kerja dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Dapat dikatakan pula bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki sumbangan yang besar terhadap keberlangsungan ekonomi Indonesia pada saat krisis dan pasca krisis ekonomi.

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada UMKM/Koperasi yang berkaitan dengan SDM antara lain seperti pada tabel berikut,

Tabel 1. Masalah-masalah UMKM-Koperasi

Type Masalah	Industri Rumah Tangga	Industri Kecil
Kurangnya modal	40,48%	36,63%
Bahan baku	23,75%	16,76%
Marketing	16,96%	4,43%
Manajemen & produksi	3,07%	26,69%
Persaingan, dll.	15,74%	17,36%
Jumlah	100,00%	100,00%

Sumber: BPS dalam Primahendra (2002)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa UMKM/Koperasi ternyata memiliki SDM yang cukup kuat karena hanya memiliki masalah yang berkaitan dengan SDM sebesar 35,77% untuk industri rumah tangga dan 48,68% untuk industri kecil. Selebihnya adalah masalah keuangan dan bahan baku. Pada tabel 3 dan 4 terlihat bahwa UMKM/Koperasi lebih banyak menggunakan modal di antara mereka sendiri. Padahal mereka hanya memperoleh *market share* sebesar 20%.

Tabel 2. Sumber Modal UMKM-Koperasi

Sumber Modal	Industri Rumah Tangga	Industri Kecil
Modal sendiri	90,36%	69,82%
Modal pinjaman	3,20%	4,76%
Modal sendiri dan pinjaman	6,44%	25,42%
Jumlah	100,00%	100,00%

Sumber: BPS dalam Primahendra (2002)

Tabel 3. Sumber Pinjaman UMKM-Koperasi

Sumber Pinjaman	Industri Rumah Tangga	Industri Kecil
Bank	18,79%	59,78%
Koperasi	7,09%	4,85%
Institusi keuangan lain	8,25%	7,63%
Lain-lain (keluarga, rentenir, dll.)	70,35%	32,16%
Jumlah	100,00%	100,00%

Sumber: BPS dalam Primahendra (2002)

Sabirin (2001) menjelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Salah satu strategi pembiayaan bagi golongan ini adalah usaha kredit mikro.

Lembaga keuangan mikro merupakan institusi yang menyediakan jasa-jasa keuangan penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Lembaga keuangan mikro ini bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan dana penduduk miskin atas ketersediaan dana. Bagi lembaga keuangan formal perbankan, penduduk miskin akan tidak dapat terlayani karena persyaratan formal yang harus dipenuhi tidak dimiliki.

Pada paper ini pembahasan tentang kinerja lembaga keuangan mikro hanya dibatasi pada *outreach* mengingat ketebatasan data.

B. Kinerja Lembaga Keuangan Mikro

Ukuran-ukuran keuangan mikro lebih dari serentetan perbandingan pengukuran *outreach* atau rasio-rasio neraca. Ukuran umum kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat dikelompokkan menjadi tiga hal pokok :

- a. Serangkaian indikator kinerja yang dapat diukur dan dimonitor
- b. Sebuah metodologi umum untuk menghitung indikator-indikator yang terseleksi
- c. Sebuah *benchmark* yang telah disepakati atau target untuk setiap indikator yang telah diseleksi.

Saat ini, jenis rasio keuangan yang terseleksi sebagai ukuran-ukuran kinerja, dan proses bagaimana mereka diseleksi bervariasi tergantung pada permintaan organisasi akan informasi. Kebanyakan usaha pada pendefinisian standar-standar keuangan mikro fokus pada dua kategori besar pengukuran kinerja, yakni *outreach* dan keberlanjutan (*sustainability*).

Outreach dipertimbangkan sebagai sebuah komponen kritis dari keberhasilan LKM, karena mendasarkan visi pada kenyataan bahwa semua LKM fokus pada menawarkan pelayanan finansial kepada sebagian besar masyarakat miskin pada satu sisi dengan pencapaian skala ekonomis pada sisi lain.

Ukuran *outreach* didesain untuk mencari / menarik sejumlah orang yang dilayani, sebaik informasi pada tingkat kemiskinan masyarakat. Indikator-indikator tersebut umumnya meliputi jumlah nasabah aktif, jumlah penabung, persentase nasabah dibawah garis kemiskinan, rata-rata pinjaman.

Pengukuran kinerja keuangan mikro sampai saat ini belum ada kesepakatan yang jelas. Masing-masing lembaga dan negara menerapkan ukuran yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Ukuran umum Kinerja Finansial dan Keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro

Indikator	WWB	CGAP	MBB	MICRO-STAT	WOCCU	ACCION
Portfolio Quality						
- Repayment rate	X	X				
- Portfolio at Risk	X	X	X	X		X
- Arrears rate		X		X	X	
- Loan loss		X		X		
Financial soundness/stability						
- Operational sustainability	X	X	X	X		
- Financial sustainability	X	X	X			
- Return on assets		X	X		X	X
- Return on equity		X	X		X	X
- Liquidity	X	X		X	X	X
- Loan loss provision		X	X		X	X
Efficiency						
- Cost per loan	X	X				
- Cost per borrower		X	X	X		
- Cost per unit money lent	X	X	X	X		X
- Number of loans per credit officer	X	X	X	X		
- Amount of loans per credit officer	X	X				
- Ratio of credit officers to total staff		X	X			
- Administrative efficiency		X	X			
- Personnel costs		X	X			

Sumber : DAI/FINNET (2003)

Keterangan :

WWB : Women's World Banking

CGAP : the Consultative Group to Assist the Poorest

MBB : the MicroBanking Bulletin

WOCCU : the World Council of Credit Unions

ACCION : ACCION International

Micro-Start : the UNDP Micro Start Program to appraise and/or monitor MFIs

Ukuran kinerja keuangan dan keberlanjutan (*sustainability*) seperti pada tabel 4 pada kesempatan ini tidak akan dibahas lebih lanjut mengingat keterbatasan data.

B.1 Temuan-temuan Kinerja LKM Wilayah Jabodetabek

Berdasarkan data tahun 2000 jumlah LKM non bank adalah sebanyak 56.644 unit (Chotim dan Handayani, 2001), sedangkan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah kurang lebih 38 juta. Artinya rasio

LKM dengan UMKM adalah 1 banding 670, atau dengan kata lain setiap LKM mempunyai nasabah 670 UMKM. Bagaimana temuan LKM yang ada di wilayah Jabodetabek?

Dengan menggunakan data SMERU 1997-2003, kinerja LKM wilayah Jabodetabek dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Kinerja LKM wilayah Jabodetabek 1997 - 2003

<i>Outreach</i>	Hasil
Rata-rata jumlah nasabah aktif	1.258 orang
Rata-rata jumlah penabung	1.270 orang
Rata-rata pinjaman	Rp. 1.500.000,-
% nasabah di bawah garis kemiskinan	-

Sumber : SMERU (2003), data diolah

Dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah penabung aktif dari 16 LKM yang menjadi responden adalah sebesar 1.258 orang (UMKM). Artinya untuk wilayah Jabodetabek rasio LKM – UMKM lebih besar dibandingkan dengan rasio keseluruhan. Rata-rata jumlah penabung juga lebih besar dibandingkan dengan jumlah rata-rata nasabah aktif. Data ini menunjukkan bahwa tidak semua penabung menjadi nasabah dalam artian peminjam. Rata-rata pinjaman Rp. 1.500.000,- per nasabah. Sedangkan untuk persentase nasabah di bawah garis kemiskinan tidak ada data.

B.2 Capacity Building bagi LKM

Secara umum *capacity building* adalah proses atau kegiatan memperbaiki kemampuan seseorang, kelompok, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan atau kinerja yang lebih baik (Brown et. al, 2001).

Capacity building adalah pembangunan keterampilan (*skills*) dan kemampuan (*capabilities*), seperti kepemimpinan, manajemen, keuangan dan pencarian dana, program dan evaluasi, supaya pembangunan organisasi efektif dan berkelanjutan. Ini adalah proses membantu individu atau kelompok untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan dan menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan melakukan perubahan. (Campobaso dan Davis (2001)

Capacity building difasilitasi melalui penetapan kegiatan bantuan teknik, meliputi pendidikan dan pelatihan, bantuan teknik khusus (*specific technical assistance*) dan penguatan jaringan.

Kebanyakan LKM seperti LKM milik pemerintah, LKM proyek, maupun LKM-LSM menghadapi persoalan mengenai keberlanjutan aktivitas mereka. Sebab ketidakmampuan menjaga mengenai keberlanjutan mereka dapat bermacam-macam mulai dari ketergantungan terhadap *support* baik dari pemerintah dan donor, hanya merupakan proyek yang memang didesain untuk sementara waktu saja, ketiadaan sistem keuangan mikro yang memadai, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan situasi pasar keuangan mikro yang ada. Menghadapi masalah ini, kiranya perlu diingat bahwa aktivitas keuangan mikro hanya akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rakyat miskin manakala pelayanan keuangan mikro yang diberikannya dapat berlanjut (Ismawan, 2002).

Pengembangan LKM harus didasarkan pada azas demokrasi ekonomi, desentralisasi, kemandirian, *undiscriminative*, dan perlindungan bagi *stakeholder* yang berkepentingan. Prinsip yang perlu diterapkan adalah membangun keberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan kapasitas (*capacity building*), mencakup : 1) kelembagaan; 2) pendanaan, 3) pelayanan. Di samping itu masalah internal yang harus dihadapi adalah masalah efisiensi, keterbatasan SDM dan teknologi (Krisnamurthi, 2002).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh LKM wilayah Jabodetabek tidak hanya untuk memperbaiki kinerja LKM itu sendiri tetapi juga untuk memberikan dukungan bagi UMKM. Setiap ada pelatihan yang mengarah kepada peningkatan kinerja hampir selalu diikuti oleh LKM-LKM yang ada di wilayah Jabodetabek.

Dari sisi pendanaan LKM terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dengan bermitra dengan berbagai pihak. Lembaga donor internasional merupakan salah satu sumber dana bagi

LKM, di samping Bank maupun lembaga nonbank serta lembaga internasional lainnya, seperti MCI, CIDA, USAID, AusAID, ILO, Europe Union, Swisscontact, ADB, dan masih banyak lembaga internasional lainnya. Perbankan yang terlibat dengan LKM dan UMKM adalah BRI, BNI, Mandiri, Bukopin, Danamon dan beberapa bank lain.

C. Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dialami oleh LKM dan UKM dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Permasalahan yang Dihadapi LKM dan UMKM

Lembaga Keuangan Mikro	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan tenaga pendamping 2. Minimnya dana pendampingan 3. Pembayaran angsuran kurang lancar 4. Kekurangan sumber daya murah 5. Keberlanjutan tidak terjamin karena hanya bersifat proyek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses ke bank formal 2. Kekurangan permodalan 3. Kuantitas dan kualitas produksi 4. Pembukuan 5. Pemasaran

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat dilihat adanya benang merah antara permasalahan yang dialami oleh LKM dengan UMKM. Bagi UMKM, masalah akses ke bank formal yang terbatas dan permodalan dapat diatasi oleh LKM dengan cara mengakses ke lembaga keuangan internasional maupun bank formal. Sementara masalah produksi, pembukuan, dan pemasaran dapat diatasi dengan pelatihan, dimana peran LKM adalah sebagai fasilitator. Disamping itu beberapa LKM juga mencoba mencari pasar buat produknya.

Sementara bagi LKM, masalah kekurangan tenaga pendamping dan minimnya dana pendampingan dapat diatasi dengan melakukan pelatihan terhadap LKM atau unsur lainnya. Atau dengan kata lain LKM mengatasinya dengan *capacity building* baik kelembagaan maupun para stafnya.

Di sisi lain temuan di lapangan menyatakan bahwa meskipun berbagai upaya dalam meningkatkan kemampuan UMKM untuk *survive* dan berkembang selalu menghadapi kendala. Apapun yang dilakukan oleh berbagai pihak secara umum kurang memberikan hasil yang maksimal bagi perkembangan UMKM.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dikatakan cukup berhasil yaitu: rasio antara UMKM dan LKM, besarnya jumlah penabung, serta kemauan LKM untuk mengikuti pelatihan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh LKM wilayah Jabodetabek tidak hanya untuk memperbaiki kinerja LKM itu sendiri tetapi juga untuk memberikan dukungan bagi UMKM. Setiap ada pelatihan yang mengarah kepada peningkatan kinerja hampir selalu diikuti oleh LKM-LKM yang ada di wilayah Jabodetabek.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan hasil yang kurang maksimal bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini disebabkan sikap mental dari pelaku UMKM itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alirol, Philippe, Andrea Baranzini and Sophie Linguri, *Support to the Vietnam National Mekong Committee A Case Study on Capacity Building*, International Academy of the Environment Working Paper, Geneva, 1998.
- [2] Anonim. 2003. Grameen Banking for the Poor: Microcredit. Dalam <http://www.grameen-info.org/mcredit/index.html>
- [3] Brown, Lisanne, Anne LaFond, and Kate Macintyre, *Measuring Capacity Building, Carolina Population Center*, University of North Carolina, Chapel Hill, 2001.

- [4] Campobasso, L and D Davis, *Reflection on Capacity Building*, the California Wellness Foundation Journal, Volume 2 no. 2, 2001.
- [5] Calmeadow. 1999. Community Micro-loan Funds in Canada. Dalam *Sorce of Finance*. <http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/insofsdf.nsf/vwGeneratedInterE/so03061e.html>
- [6] Chotim, E.E dan Handayani, A.D, *Lembaga Keuangan Mikro Dalam Sejarah*, Jurnal Analisis Sosial, Volume 6, Nomor 3 Desember 2001.
- [7] INTRAC, The Newsletter of International NGO Training and Research Center, No. 11, 1998.
- [8] Ismawan, Bambang, a, *Masalah UKM dan Peran LSM*, Jurnal Ekonomi Rakyat on-line www.ekora.org , Februari, 2002.
- [9] Ismawan, Bambang, b, *Ekonomi Rakyat : Sebuah Pengantar, Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat*, Fianancial Club Jakarta, 22 Januari, 2002.
- [10] Ismawan, Bambang, c, *Keuangan Mikro Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Temu Nasional dan Bazar Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia, 22-25 Juli 2002.
- [11] Ismawan, Bambang, d, *Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia Butuh Payung Regulasi*, artikel www.binaswadaya.org , 7 Agustus 2002.
- [12] Krisnamurthi, Bayu, *RUU Keuangan Mikro : Rancangan Keberpihakan Terhadap Ekonomi Rakyat*, www.bmm-online.org , Februari 2002.
- [13] LaFond A, 1995, *Sustaining Primary Health Care*, Earthscan Publication, London
- [14] McVay, Mary, 1999, *Measuring BDS Performance – a summary framework*, dalam *Small Enterprise Development* Vol 10 No. 2 : hal 17 – 29
- [15] Primahendra, R. 2002. The Role of Micro Finance In Economic Development & Poverty Eradication. Workshop On Micro Credit Schemes In NAM Member Countries (Empowering Women's Role In Small-Scale Business Development), Jakarta, 24 –25 June 2002.
- [16] Purbo, O.W. 2001. Usaha Kecil dan Rumah Tangga di Dunia Maya. Artikel harian Kompas di www.bmtlink.web.id
- [17] Sabirin, S. 2001. Pemanfaatan Kredit Mikro untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat di dalam Era Otonomi Daerah. Orasi Ilmiah Lustrum IX Universitas Andalas, Padang, 13 September 2001.
- [18] Srinivas, H. 1999. The Virtual Library on Microcredit. Dalam <http://gdrc.org/icm/concept.html>
- [19] Swasono, S. E. 2001. *Empowerment vs Disempowerment: Restrukturisasi, Ekonomi Rakyat dan Globalisasi*. Lokakarya Inovasi dalam Manajemen Kemandirian Daerah Era Otonomi. Kerjasama Depdagri Otda dengan Bank Dunia. Sanur, Bali, Juni, 2001.
- [20] Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Gramedia, Jakarta, 1999.
- [21] Wardoyo & Prabowo, H. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kredit-mikro Model Kesuma. Lokakarya Inovasi dalam Manajemen Kemandirian Daerah Era Otonomi. Kerjasama Depdagri Otda dengan Bank Dunia. Sanur, Bali, Juni, 2001.